

PERKEMBANGAN (PRESTASI) PENDIDIKAN MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL

Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata

I. GLOBALISASI

1. Tantangan Globalisasi

Menjelang berakhirnya abad 20 dunia ditandai oleh suatu revolusi besar dalam kehidupan umat manusia yaitu globalisasi. Globalisasi ini meliputi hampir seluruh aspek kehidupan: sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan, dll, dan memasuki awal abad 21, perkembangannya semakin cepat dan kompleks. Munculnya globalisasi diawali oleh kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat cepat, khususnya dalam teknologi informasi, komunikasi dan juga transportasi. Kemajuan yang luar biasa dari ketiga jenis teknologi tersebut mengakibatkan perkembangan dan penyebaran informasi yang sangat cepat, akurat dan menyeluruh, melampaui batas-batas geografis, kenegaraan, dan social-budaya, sehingga tercipta masyarakat dan dunia global.

Dunia seolah-olah menjadi semakin kecil dan transparan. Sudut-sudut dunia dan perubahan pada masyarakat yang sangat jauh sekalipun dapat kita saksikan setiap saat dari setiap tempat melalui radio, televisi, dan internet. Kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dari berbagai belahan dunia. Kita juga dapat pergi kemana saja dengan mudah dan cepat. Kita dapat dengan mudah memperoleh hampir setiap produk yang dihasilkan dari negara mana saja juga dengan mudah. Kehidupan menjadi semakin mudah, tetapi sekaligus juga semakin sukar. Kehidupan menjadi mudah karena telah tersedia alat dan fasilitas yang canggih dan lengkap. Kehidupan juga semakin sukar, karena alat-alat dan fasilitas tersebut, tidak gratis, harus dibeli. Secara langsung dibeli dengan uang, tetapi secara tidak langsung dibeli dengan kemampuan, kecakapan, kualitas pribadi, dan kinerja.

2. Lingkaran-lingkaran Kehidupan

Globalisasi melahirkan kompetisi, siapa yang memiliki kemampuan, kecakapan, kualitas pribadi dan kinerja yang tinggi, dialah yang akan mampu berkompetisi, dialah yang dapat memanfaatkan segala alat dan fasilitas modern yang tersedia. Ruang kehidupan membentuk lingkaran-lingkaran. Ada lingkaran pusat, di mana orang-orang berkemampuan, berkualitas pribadi dan berkinerja sangat tinggi berada, mereka merupakan pembaharu, penemu, pengembang, penghasil, pemimpin dan pengatur bagi lingkaran-lingkaran di luarnya. Lingkaran tengah tempat beradanya orang-orang berkemampuan, pribadi dan kinerja relatif tinggi, mereka merupakan pelanjut, perantara, pembantu dan mempunyai hubungan yang dekat dengan orang-orang pada lingkaran pertama. Lingkaran luar tempat beradanya orang-orang berkemampuan cukup dan rendah, mereka merupakan pengguna, tenaga operasional, dan pelayan dari orang-orang pada lingkaran pertama dan kedua.

Lingkaran-lingkaran tersebut bukan sesuatu yang diam dan statis, tetapi bergerak, berubah dan dinamis. Orang-orang yang berada pada lingkaran pusat, bisa bergeser atau tergeser ke lingkaran tengah bahkan lingkaran luar, karena kemampuan dan kinerjanya menurun. Di pihak lain ada orang-orang dari lingkaran tengah dan luar, yang kemampuan, kepribadian dan kinerjanya berkembang sangat pesat, sehingga masuk ke lingkaran pusat. Di samping itu ada kelompok orang yang berada di luar lingkaran. Mereka tidak bisa masuk ke dalam lingkaran, sekalipun lingkaran luar, karena kemampuan, kualitas pribadi dan kinerjanya sangat rendah. Mereka merupakan kelompok pinggiran atau terpinggirkan. Mereka bisa menjadi kelompok penonton, tetapi juga kelompok yang rawan terlibat berbagai bentuk kriminalitas dan kebrutalan.

Ancaman terjadinya pergeseran ke arah lingkaran luar, bahkan luar lingkaran dalam era globalisasi semakin kuat, karena kompetisi bukan hanya terjadi antar orang, antar kelompok, antar daerah, propinsi, tetapi juga antar bangsa. Pada tahun 2020 akan terselenggara pasar bebas pada tingkat Asia-Pasifik, yang didahului pada tingkat Asia tahun 2010, dan tingkat Asia Tenggara pada tahun 2005. Apa arti dari pasar bebas tersebut?. Negara-negara penandatanganan pasar bebas sepakat, saling memasarkan produk negaranya pada negara lain sesama anggota pasar bebas tanpa dikenai pajak masuk. Produk apa yang dipasarkan?, semua produk, produk alam atau buatan, produk pabrik, pertanian, tambang, laut, termasuk produk pendidikan.

Hal itu berarti, lulusan-lulusan pendidikan, terutama pendidikan jenjang perguruan tinggi, harus siap dan mampu bersaing dengan lulusan luar negeri, yang akan datang ke negerinya, tetapi juga lulusan pendidikan di dalam negeri, harus mampu bersaing dengan lulusan luar negeri di luar negeri. Lulusan perguruan tinggi jangan hanya berkiprah di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

3. Kiat-kiat Menghadapi Tantangan Globalisasi

Apa yang harus dilakukan agar mampu bersaing dengan alumni perguruan tinggi lain? daerah lain, negara lain ? agar tidak termasuk manusia pinggiran, terpinggirkan atau manusia di luar lingkaran? Jawabannya jelas telah dikemukakan di atas, harus memiliki kemampuan, kecakapan, kualitas pribadi dan kinerja yang tinggi.

Tim kerja UNESCO yang dipimpin oleh Jacques Dellors (1998) merumuskan empat resep yang mereka sebut sebagai pilar-pilar belajar, yang merupakan pilar-pilar untuk mencapai kemajuan di era globalisasi.

Agar generasi muda tidak terpinggirkan dan memiliki nilai kompetitif, pertama mereka harus belajar tahu atau "*learning to know*". Menurut saya, belajar tahu pun masih harus ditingkatkan menjadi berusaha tahu banyak atau *knowing much*. Setiap pemuda harus punya semangat dan berusaha belajar untuk tahu banyak. Era global disebut juga era informasi, karena ditandai oleh berkembang dan tersedianya informasi yang sangat banyak. Para pemuda harus menguasai informasi, sebab siapa yang menguasainya mereka yang berpotensi maju. Pada web site LIPI Indonesia umpamanya, khususnya pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, di situ tersedia dan dapat dipelajari berbagai informasi untuk pengembangan wiraswasta, bagaimana membuat alat-alat pengolahan, bagaimana berbudi daya dalam pertanian, perikanan, peternakan, pengolahan air dan sanitasi, pengolahan pangan, dll.

Perlu diwaspadai dan diingat kalau belajar dari internet, belajar atau carilah informasi-informasi yang positif, yang berguna dan akan membawa kemajuan dan kebaikan bagi diri kita dan lingkungan, jangan mencari dan mempelajari yang negatif, sebab dalam internet juga tersedia informasi-informasi yang negatif. Memang menurut Plato juga manusia ditarik oleh dua kuda, kuda putih yang selalu menarik ke arah yang positif-konstruktif atau yang "**ma'ruf**" dan kuda hitam yang selalu menariknya kepada yang negatif-destruktif atau yang "**munkar**".

Kita harus selektif, kalau tidak mau tergelincir kepada kesesatan. Janganlah bermain-main dengan api sebab dapat menimbulkan kebakaran.

Pilar kedua, menurut tim Unesco, adalah belajar berbuat atau *"learning to do"*. Pengetahuan yang kita peroleh melalui belajar tahu, dilanjutkan, diterapkan melalui perbuatan. Tahu saja belum cukup, sebab pengetahuan, baru akan menghasilkan jika diterjemahkan dalam perbuatan. Informasi tentang berbagai ketrampilan dan cara berbudi daya yang disediakan LIPI harus dilatih dan dikerjakan sehingga trampil dan akhirnya menghasilkan. Belajar berbuat juga menurut saya harus dioptimalkan, menjadi berusaha berbuat banyak atau *"doing much"*. Tanpa semangat untuk berbuat banyak hasilnya tidak optimal, dan mungkin juga akan mudah patah di tengah jalan. Pilar ketiga, adalah belajar menjadi atau *"learning to be"*. Belajar tahu dan belajar berbuat ditujukan agar seseorang menjadi sesuatu, menjadi tukang, menjadi ahli, menjadi pakar atau menjadi seorang profesional. Resep ketiga ini juga harus ditingkatkan menjadi berusaha mencapai keunggulan atau *"being excellence"*. Menjadi tukang atau ahli yang biasa-biasa saja tidak akan berprestasi sebab tidak memiliki kemampuan kompetitif, atau akan kalah bersaing dengan orang-orang yang memiliki keunggulan. Berusahalah menguasai sesatu secara optimal, sampai memiliki keunggulan. Unggul tidak usah menggungguli semua orang dan dalam segala hal. Kita cukup unggul dalam sesuatu, biar orang lain unggul dalam hal lain.

Pilar keempat, adalah belajar membina hubungan sosial atau *"learning to live together"*. Manusia sebagai makhluk sosial, selalu berhubungan dan bekerjasama dengan orang lain. Pilar inipun perlu ditingkatkan menjadi berusaha membina hubungan sosial yang baik atau *"being sociable"*. Agar mampu mencapai kesuksesan, seseorang harus berusaha untuk membina hubungan yang baik, sebab kesuksesan membutuhkan bantuan, dan kerjasama dengan orang lain. Dalam era globalisasi, kerjasama tidak hanya terbatas dengan teman selembara atau seprofesi, dan sederaah tetapi juga dari luar, bahkan dari negara lain.

Menurut saya keempat pilar tersebut, belum lengkap perlu ditambah dengan sesuatu yang sangat esensial, yaitu masalah moral, berusaha berpegang kuat pada nilai moral atau *"being morally"*. Nilai moral, baik moral sosial dan lebih-lebih nilai agama, karena penguasaan pengetahuan, kecakapan berbuat, keunggulan dan kemampuan kerjasama yang tinggi harus dilandasi oleh landasan dan penerapan nilai-nilai moral. Usaha yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai moral, tidak akan bertahan lama, sebab selain akan terancam hukum negara, juga tidak akan mendapat ridlo dari Allah, SWT.

Manusia-manusia yang hidup di abad ini dituntut untuk berusaha tahu banyak, berbuat banyak, mencapai keunggulan, mampu menjalin hubungan dan kerjasama dengan orang lain, dan juga memegang teguh nilai-nilai moral.

Manusia-manusia "unggul, bermoral dan pekerja keras " inilah yang menjadi tuntutan dari masyarakat global. Manusia-manusia demikian akan mampu berkompetisi, bukan saja dengan sesama warga dalam suatu daerah, wilayah ataupun negara tetapi juga dengan warga negara dan bangsa lainnya.

Dasar-dasar dari pengembangan manusia yang "unggul-bermoral kuat-pekerja keras" diberikan di sekolah, pengembangan selanjutnya berlangsung di masyarakat dan lingkungan-lingkungan pekerjaan. Sekolah memang tidak akan mampu mencetak manusia-manusia tersebut, tetapi memberikan landasannya, dasar-dasarnya, embrionya untuk dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan manusia-manusia "unggul-bermoral-pekerja keras" berlangsung dalam proses yang lama, tetapi dasar-dasarnya diberikan dan dikembangkan dalam pendidikan terutama sekolah.

Untuk dapat menghasilkan manusia-manusia demikian pendidikan harus secara berangsur ditingkatkan mutunya. Mutu pendidikan atau mutu sekolah seringkali tertuju pada mutu lulusan, tetapi merupakan suatu kemustahilan pendidikan atau sekolah menghasilkan lulusan yang bermutu, kalau tidak diproses melalui kegiatan pendidikan yang bermutu pula. Di lain pihak proses pendidikan yang bermutu, juga berlangsung karena didukung oleh faktor-faktor penunjang proses pendidikan yang bermutu pula.

Faktor penunjang proses pendidikan ini disebut sumber daya pendidikan (SDP) meliputi personalia (adminstrator, guru, konselor, tata usaha, pustakawan, laboran), sarana-prasarana dan fasilitas pembelajaran, biaya serta partisipasi masyarakat.

Mutu pendidikan atau pendidikan yang bermutu, bersifat menyeluruh, menyangkut semua komponen, pelaksana dari kegiatan pendidikan, atau sering disebut sebagai mutu total atau "*Total Quality*". Kegiatan pendidikan cukup kompleks, satu kegiatan, komponen, pelaku, waktu, terkait dan membutuhkan dukungan dari kegiatan, komponen, pelaku, lainnya.

4. Masyarakat Belajar

Beberapa ahli menyatakan bahwa pada beberapa tahun mendatang, hanya akan ada dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat produsen dan masyarakat konsumen. Masyarakat

produsen atau masyarakat produktif (*productive society*) adalah masyarakat penghasil dan pemberi layanan jasa yang bermutu. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk alam seperti barang galian, tanaman, ternak, dll.; produk pabrik atau industri, produk pendidikan, seni, dll. Masyarakat produktif juga dapat berbentuk masyarakat pemberi layanan jasa, yaitu masyarakat yang dapat memberikan layanan jasa yang bermutu. Layanan ini dapat diberikan dalam bidang pariwisata, perhotelan, transportasi, kesehatan, layanan sosial, public, pendidikan, dll. Layanan jasa yang bermutu adalah layanan yang sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan, tuntutan dan harapan pengguna.

Masyarakat konsumen atau masyarakat konsumtif (*consumptive society*), adalah masyarakat pengguna atau pemakai produk atau layanan jasa yang dihasilkan atau diberikan oleh masyarakat produsen.

Masyarakat produsen dibangun oleh masyarakat belajar (*learning society*), dan masyarakat belajar akan terbentuk apabila sebagian besar dari warganya suka atau gemar belajar (*learning people*). Belajar tidak hanya berlangsung secara formal di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga berlanjut setelah tamat belajar di sekolah atau di perguruan tinggi. Belajar juga berlangsung secara mandiri (*self learning*), sebab kewajiban belajar adalah “*mulai dari buaian sampai menjelang liang lahat*” (dari mulai lahir sampai menjelang kematian). Orang atau masyarakat belajar, adalah individu-individu dan kelompok yang memiliki kemandirian untuk mencapai keunggulan, memiliki motif berprestasi yang tinggi, yang dapat memanfaatkan waktu dan fasilitas yang ada secara efisien, disiplin diri (*self discipline*) yang kuat. Keempat pilar belajar yang dikemukakan Delor, ditambah belajar moral, harus dilakukan bukan hanya di sekolah atau perguruan tinggi tetapi terus dan terus dilakukan setelah tamat sekolah, sambil bekerja, sambil melaksanakan tugas-tugas kemsyarakatan.

Belajar bagaimana yang akan membawa kepada masyarakat produktif?, yaitu belajar yang dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, integritas pribadi, keahlian secara standar. Pada jenjang pendidikan menengah sampai pada tahap mahir, trampil atau “*skillful*”, dan pada tahap pendidikan tinggi sampai pada tahap ahli atau “*professional*”. Ke-trampil-an dan ke-professional-an ini bukan hanya dalam tahap penguasaan tetapi juga harus dinyatakan dalam bentuk kinerja (*performance*), berkinerja secara standar. Tiap pekerjaan ada standar prosedur kerjanya atau “*standard operational procedure*” (SOP), berkinerja secara professional adalah bekerja sesuai dengan SOP.

II. VISI, MISI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA

1. Visi dan Misi Pendidikan Nasional

Pembangunan Indonesia pada masa depan bersandar pada visi Indonesia jangka panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia modern yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek, yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu:

- (a) segi afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis;
- (b) segi kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- (c) aspek psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis (Renstra Depdiknas RI 2010-2014).

Fokus pembangunan pendidikan nasional Indonesia ke depan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing SDM Indonesia pada era perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) dan pembangunan ekonomi kreatif.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, dan masyarakat sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.

Selain itu, pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena

itu, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

UUD 1945 mengamanatkan mengenai pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 C Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Sesuai Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pendidikan Nasional dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Misi Pendidikan Nasional adalah:

- a. Memperluas & pemeratakan akses PAUD bermutu-berkesetaraan gender di semua provinsi, kab-kota;**
- b. Memperluas & pemeratakan akses pend dasar universal bermutu-berkesetaraan gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota;**
- c. Memperluas & pemeratakan akses pendi menengah bermutu,berkesetaraan gender, relevan dg kebutuhan masyarakat, di semua provinsi, kabupaten- kota;**

- d. Memperluas & pemeratakan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender, relevan dg kebutuhan bangsa dan negara;**
- e. Memperluas & pemeratakan akses pendidikan orang dewasa berkelanjutan yg berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;**
- f. Mewujudkan tata kelola, sistem pengendalian manajemen, dan sistem pengawasan intern yang modern, efektif, dan efisien.**

2. Beberapa Kebijakan Perkembangan Pendidikan

Dalam lima tahun terakhir dan beberapa tahun mendatang Indonesia memiliki beberapa kebijakan dalam meningkatkan pendidikan.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 (PP 19) tentang Standar Nasional Pendidikan, ditegaskan bahwa standar nasional pendidikan sebagai standar minimal. Standar nasional pendidikan mencakup delapan komponen pendidikan, yaitu standar: isi (kurikulum), proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.

Khusus untuk meningkatkan profesionalisme Guru dan Dosen, telah dikeluarkan Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, bahwa semua guru dan dosen harus memiliki sertifikat profesi. Sertifikat profesi ini diberikan pada mereka yang telah lulus pendidikan dan uji profesi. Pendidikan profesi diberikan pada guru-guru yang telah memiliki pendidikan minimal S1 atau D4, dan untuk dosen minimal S2.

Sebagai kelanjutan dari kebijakan sebelumnya tentang otonomi daerah, juga dikeluarkan sejumlah Peraturan Menteri berkenaan dengan pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan (KTSP), manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS), penjaminan mutu pendidikan, perintisan sekolah berbasis internasional (RSBI), pengembangan sekolah berkeunggulan lokal, di samping peningkatan program-program pendidikan yang telah ada sebelumnya, baik berkenaan dengan pendidikan formal, dan non formal, maupun pendidikan dalam lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah, pondok pesantren, dll.

Dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Indonesia (Renstra Depdiknas) tahun 2005-2009 digariskan tiga tema kebijakan penyelenggaraan pembangunan pendidikan, yaitu: a. Perluasan dan pemerataan pendidikan, b. Mutu, relevansi dan daya saing,

dan c. Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Beberapa hasil yang telah dicapai dari rencana strategis tersebut akan disampaikan dalam penyajian berikutnya.

Renstra Depdiknas Indonesia tahun 2010-2014 melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah diawali dalam Renstra 2005-2009. Ada beberapa pilar kegiatan yang menjadi sasaran utama dalam Renstra 2010-2014, yaitu: 1) Pendidikan agama dan ahlak mulia, 2) Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi, 3) Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 4) Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, 5) Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 6) Penyediaan sarana belajar yang mendidik, 7) Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan, 8) Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata, 9) Pelaksanaan wajib belajar, 10) Pelaksanaan otonomi satuan pendidikan, 11) Pemberdayaan peran masyarakat, 12) Pusat pembudayaan dan pengembangan masyarakat, dan 13) Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

IV. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Indonesia dengan penduduk kurang lebih 230 juta orang dan cakupan wilayah yang cukup luas, serta variasi kondisi dan tahap perkembangan daerahnya, memang menghadapi beberapa kendala dalam mengimplementasi kebijakan dan program-program pengembangan pendidikan. Banyak kemajuan yang telah dapat dicapai, tetapi ada pula beberapa kelambatan dan hambatan yang dihadapi.

1. Capaian (Prestasi) Umum Pendidikan.

Dalam periode 2005-2009 Departemen Pendidikan Nasional Indonesia telah berhasil secara nasional (massal), mengembangkan kebijakan-kebijakan terobosan, yaitu (1) pendanaan massal pendidikan, (2) peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik secara massal, (3) penerapan TIK secara massal untuk e-pembelajaran dan e-administrasi, (4) pembangunan prasarana dan sarana pendidikan secara massal, (5) rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan secara massal, (6) reformasi perbukuan secara mendasar, (7) peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif, (8) perbaikan rasio peserta didik SMK:SMA, (9) otonomisasi satuan pendidikan, (10) intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan

informal untuk menggapai layanan pendidikan kepada peserta didik yang tak terjangkau pendidikan formal (*reaching the unreached*), dan (11) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan dengan pendekatan komprehensif.

2. Capaian (Prestasi) Khusus Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah

Upaya perluasan akses pendidikan telah berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah (jumlah siswa yang belajar). Angka partisipasi sekolah ini dibedakan antara Angka Partisipasi Murni (APM) dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM adalah angka partisipasi yang sesuai dengan rentang usianya (umpamanya Sekolah Dasar atau SD/MI/Paket A 6 – 12 tahun). APK angka Partisipasi yang usianya mencakup juga usia di bawah atau di atas rentang usianya. (umpamanya SD/MI/Kejar Paket A kurang dari 6 tahun dan lebih dari 12 tahun).

Hasil-hal yang telah dicapai dalam Angka Partisipasi Sekolah adalah sbb: 1) Jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak, usia 3.00 – 6.00 tahun) dalam APK ada peningkatan dari 39,09% pada tahun 2004 menjadi 50,62% pada tahun 2008; 2). Pada jenjang SD/MI/Paket A dari 112,5% pada tahun 2004 menjadi 116,56% pada tahun 2008, APM meningkat dari 94,12% pada tahun 2004 menjadi 95,14% pada tahun 2008; 3) Pada jenjang SMP/MTs/ sederajat APK meningkat dari 81,22% pada tahun 2004 menjadi 96,16% pada tahun 2008; 4) APK SMA/MA/SMK sederajat meningkat dari 49,01% pada tahun 2004 menjadi 64,26% pada tahun 2008; 5) Pada jenjang pendidikan tinggi APK meningkat dari 14,62% pada tahun 2004 menjadi 17,75% pada tahun 2008, 6) Tingkat literasi penduduk usia lebih dari 15 tahun meningkat dari 89,79% pada tahun 2004 menjadi 94,03% pada tahun 2008.

Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan perbandingan/persentase jumlah siswa wanita terhadap pria dalam satu satuan pendidikan. Rasio kesetaraan gender pada jenjang pendidikan: 1) PAUD meningkat dari 60% pada tahun 2004 menjadi 85% pada tahun 2008; 2) Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A meningkat dari 60% pada tahun 2004 menjadi 85% pada tahun 2008; 3) Jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B meningkat dari 70% pada tahun 2004 menjadi 90% pada tahun 2008; 4) Jenjang pendidikan SMA/MA/SMALB/Paket C meningkat dari 93,8% pada tahun 2004 menjadi 95,6% pada tahun 2008; 5) Jenjang pendidikan tinggi naik dari 90,1% pada tahun 2004 menjadi 102,3% pada tahun 2008; 6) Rasio kesetaraan gender pada buta aksara juga meningkat dari 92,7% pada tahun 2004 menjadi 96,8% pada tahun 2008.

Rasio Guru terhadap Siswa

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis guru. Dengan kata lain, guru merupakan komponen yang sangat krusial pada sekolah. Tidak hanya mutu guru, jumlah guru di sekolah harus seimbang dengan jumlah siswa. Keterbatasan jumlah guru di sebuah sekolah dapat berakibat pada jumlah siswa yang dapat diterima di sekolah tersebut, yang berarti mengurangi akses calon peserta didik untuk memperoleh pendidikan.

Pada jenjang SD, secara nasional rasio guru terhadap siswa telah sangat baik, yaitu 20 siswa per guru, namun, rasio di setiap provinsi, ada disparitas yaitu dari 33 siswa per guru di Provinsi Papua hingga 13 siswa per guru di Provinsi DI. Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Selatan

Pada jenjang SMP secara nasional rasio guru:siswa 14 siswa per guru, tetapi rasio per provinsi, ada disparitas, di Provinsi Gorontalo dan Provinsi DI Yogyakarta telah mencapai 12 siswa per guru, sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Provinsi Banten 27 dan 28 siswa per guru.

Pada jenjang pendidikan menengah (SMA & SMK) rasio guru:siswa secara nasional masing-masing telah mencapai 18 dan 25 guru per siswa, namun, pada provinsi ada disparitas, rasio guru:siswa yang sangat baik di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo (12 siswa per guru), pada SMK di Provinsi Maluku (11 siswa per guru). Rasio guru:siswa SMA di Provinsi Papua Barat adalah 29 guru per siswa, dan pada SMK di Provinsi Aceh adalah 49 siswa per guru.

Nilai dan Tingkat Kelulusan Ujian Nasional

Salah satu indikator kinerja peningkatan mutu pendidikan adalah rata-rata nilai ujian nasional (UN) siswa. Rata-rata nilai UN siswa SD pada tahun 2008 adalah 7,03, siswa SMP/MTs 7,02, siswa SMA/SMK/MA adalah 7,17, dan semuanya telah melampaui target sebesar 7,00..Tingkat kelulusan jenjang SMP/MTs adalah sebesar 92,76%, jenjang SMA/MA, jurusan IPA sebesar 94,08%, jurusan IPS sebesar 89,42%, jurusan Bahasa sebesar 90,16%, dan jurusan Agama sebesar 91,19%, sementara itu, jenjang SMK adalah sebesar 92,58%.

Kualifikasi Guru

Persentase guru secara umum dengan kualifikasi S-1/D-4 pada tahun 2008 adalah sebesar 47,5% (telah melampaui target nasional 37,5%), persentase dosen yang berkualifikasi S-2/S-3 pada tahun 2008 sebesar 52,9% (masih di bawah target target nasional sebesar 65%).

Berkenaan dengan sertifikat sebagai pendidik, persentase guru baru 23% dan dosen 15%,keduanya masih di bawah target. .

Persentase guru TK/TKLB dan guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 berturut-turut 13% dan 21%, sementara target nasional adalah 20% dan 25%. Pada jenjang SMPMTs 64% dan jenjang pendidikan SMA/MA 90% SMK 82%.

Upaya lain untuk peningkatan mutu guru adalah melalui program sertifikasi guru yang dilaksanakan mulai tahun 2006. Sampai tahun 2008 sertifikasi guru telah mencapai 15,2%, masih di bawah target nasional (20%), namun, tingkat kelulusan sudah di atas 90%.

Sekolah Bertaraf Internasional dan Berkeunggulan

Program pengembangan sekolah/madrasah bertaraf internasional (SBI) telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 2008 telah terbentuk 207 SD, 277 SMP, 259 SMA, dan 300 SMK berstandar internasional atau rintisan berstandar internasional. Hasil yang sama juga terjadi pada program sekolah/madrasah berbasis keunggulan tokal, samapi tahun 2008 telah dikembangkan sebanyak 100 SMA dan 341 SMK berbasis keunggulan lokal

Perguruan Tinggi BHMN

Mulai tahun 2000, beberapa perguruan tinggi negeri telah ditingkatkan statusnya menjadi perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara. Perguruan tinggi-perguruan tinggi tersebut

memiliki otonomi yang sangat besar untuk mengatur lembaganya sendiri, walaupun untuk sementara tetap mendapat bantuan terutama dalam segi pembiayaan dari pemerintah. Perguruan tinggi BHMN ada beberapa seperti: Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung di Bandung, Institut Pertanian Bogor di Bogor, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Universitas Diponegoro di Semarang, Universitas Sumatra Utara di Medan, dan beberapa universitas lainnya yang masih dalam proses legalisasi.

Prestasi Internasional

Dalam hal prestasi siswa-siswa Indonesia di ajang olimpiade internasional, pada tahun 2008 telah diperoleh 117 medali emas. Capaian ini jauh di atas target nasional sebesar 20 medali emas. Distribusi medali emas tersebut pada jenjang pendidikan dasar adalah 52 medali, jenjang pendidikan menengah 36 dan pendidikan tinggi 29 medali. .

Aspek Tata Kelola dan Kinerja Organisasi Pendidikan

Dalam aspek tata-kelola, sudah banyak prestasi yang dicapai Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2004 sampai tahun 2009. Dalam aspek pengelolaan anggaran Depdiknas sudah berhasil mencapai opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK.

Dari sisi akuntabilitas kinerja organisasi yang dinilai melalui LAKIP, Depdiknas berhasil mendapatkan peringkat ketiga pada tahun 2006 dan peringkat pertama pada tahun 2007.

Manajemen Mutu Layanan

Dalam rangka peningkatan manajemen mutu layanan pendidikan Departemen Pendidikan Nasional telah berhasil mendorong tingkat layanan berbasis standar internasional (ISO) pada tahun 2006, yaitu 2 sertifikat dari 42 unit kerja, 2007 24 sertifikat, 2008 42 sertifikat dari 42 unit kerja. Sementara itu, untuk LPMP/P4TK/BPPNFI telah meningkat dari 11 sertifikat dari 47 UPT menjadi 47 sertifikat dari 47 UPT.

Daftar Kepustakaan

- Colclough, Christopher. (2004). *Education for All: The Quality Imperative*. Paris: Unesco Publishing.
- Dellors, Jacques, et al. (1998). *Learning: the Treasure Within*. UNESCO
- Gross, Ronald. (1991). *Peak Learning*. New York:Jeremy P. Tarcher.
- Micklethwait, J. dan Wooldridge, A. (2000). *A Future Perfect: The Challenge and Hidden Promise of Globalization*. New York: Crown Publisher.
- Orstein, A.C., Levine, D.U., (1993). *Foundations of Education*. Boston: Houghton Mifflin Co.
- Ristek-LIPI (2000). *Teknologi Tepat Guna Membangun UKM/IKM Daerah*. Jakarta: Kantor Deputi Menristek Bidang Pendayagunaan & Pemasyarakatan IPTEK
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Guru dan Dosen*. Jakarta: Depdiknas
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas
- Republik Indonesia. (2006). *Permendiknas tentang: Standar Isi, Kompetensi Lulusan, Kurikulum*. Jakarta: Depdiknas.
- Rohman, N., Sukmadinata, N.S., Ibrahim, R., Djohar, A. (Ed). (2007). *Rujukan Filsafat, Teori dan Praktis Ilmu Pendidikan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Press.
- Senge, Petre, et al. (2000). *Schools That Learn*. London: Nicholas Brealy Publishing.
- Sukmadinata, N.Sy. (2009). *Pendidikan Menyongsong Keunggulan Masa Depan*. Bandung: Yayasan Kesumakarya.
- Sukmadinata, N.Sy. (2007). *Landasan Psikologis Proses Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sukmadinata, N.Sy., Ahman, Jami'ata A.N., (2008). *Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar*. Bandung: Maestro.
- Sukmadinata, N.Sy., Ahman, Jami'ata A.N., (2005). *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*. Bandung: Maestro